

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2025

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

adalah salah satu entitas akuntansi di bawah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada . Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

**BENGKULU, 31 Desember 2025**
Kepala Balai Besar

Dr. Shannora Yuliasari, S.TP, M.P
NIP. 197407312003122001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32 Aset Tak Berwujud	

C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BENGKULU**

JALAN IRIAN KM. 6.5, SEMARANG, SUNGAI SERUT, KOTA BENGKULU 38119
TELEPON (0736) 23030, FAKSIMILI (0736) 345568
WEBSITE: bengkulu.brmp.pertanian.go.id, E-MAIL: brmp.bengkulu@pertanian.go.id

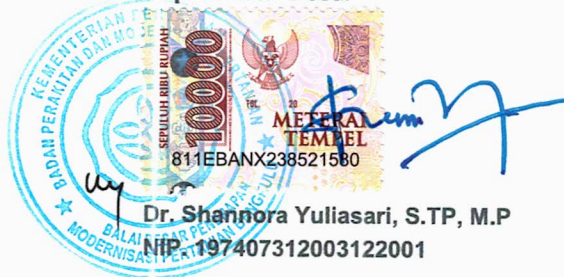
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

BENGKULU, 31 Desember 2025

Kepala Balai Besar


Dr. Shannora Yuliasari, S.TP, M.P
NIP. 197407312003122001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp449.288.335 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp449.288.335 atau mencapai 157,67 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp284.960.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.258.918.485 atau mencapai 94,23 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.826.062.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp25.336.777.227 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp15.843.496; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp25.317.251.899 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp3.681.832.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp28.862.558 dan Rp25.307.914.669

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp400.942.939 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.243.934.976 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-9.842.992.037, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp257.749.896 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.585.242.141.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp26.082.601.660, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-9.585.242.141 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 925.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 8.809.630.150 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp25.307.914.669

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU 633996

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 3:10 PM
Halaman : 1
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah							
I. Pendapatan Perpajakan							
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak							
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	284,960,000	449,288,335	164,328,335	158	153,942,000	211,804,500	(57,862,500)
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	284,960,000	449,288,335	164,328,335	158	153,942,000	211,804,500	(57,862,500)
III. Pendapatan Hibah							
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	284,960,000	449,288,335	164,328,335	158	153,942,000	211,804,500	(57,862,500)
B. Belanja Negara							
I. Belanja Pemerintah Pusat							
1. Belanja Pegawai	9,826,062,000	9,258,918,485	(567,143,515)	94	9,390,519,000	8,953,399,394	437,119,606
2. Belanja Barang	5,202,668,000	5,186,603,599	(16,064,401)	100	4,694,761,000	4,629,007,085	65,753,915
3. Belanja Modal	4,459,683,000	3,931,868,885	(527,814,115)	88	4,530,258,000	4,166,713,809	363,544,191
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	163,711,000	140,446,001	(23,264,999)	86	165,500,000	157,678,500	7,821,500
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah							
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU 633996

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 3:10 PM
Halaman : 2
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	9,826,062,000	9,258,918,485	(567,143,515)	94	9,390,519,000	8,953,399,394	437,119,606	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Bengkulu, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. Shannora Yuliasari, S.TP, M.P
Nip.197407312003122001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (633996) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 3:10 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	400,942,939	160,054,500	240,888,439	150.504
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	400,942,939	160,054,500	240,888,439	150.504
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	400,942,939	160,054,500	240,888,439	150.504
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,185,098,103	4,625,864,377	559,233,726	12.089
Beban Persediaan	34,417,000	100,474,984	(66,057,984)	(65.746)
Beban Barang dan Jasa	2,681,423,126	2,763,274,353	(81,851,227)	(2.962)
Beban Pemeliharaan	736,139,441	740,089,221	(3,949,780)	(0.534)
Beban Perjalanan Dinas	480,144,049	569,338,898	(89,194,849)	(15.666)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	280,899,500	106,975,000	173,924,500	162.584

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (633996) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 3:10 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	846,921,757	1,021,402,378	(174,480,621)	(17.082)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1,108,000)	108,000	(1,216,000)	(1,125.926)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	10,243,934,976	9,927,527,211	316,407,765	3.187
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,842,992,037)	(9,767,472,711)	(75,519,326)	0.773
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	7,157,200	(21,882,500)	29,039,700	(132.707)
Pendapatan Pelepasan Aset	7,157,200	0	7,157,200	
Beban Pelepasan Aset	0	21,882,500	(21,882,500)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	250,592,696	95,197,500	155,395,196	163.235
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	250,592,696	136,350,000	114,242,696	83.786
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	41,152,500	(41,152,500)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	257,749,896	73,315,000	184,434,896	251.565
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,585,242,141)	(9,694,157,711)	108,915,570	(1.124)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,585,242,141)	(9,694,157,711)	108,915,570	(1.124)

Keterangan :

FINAL

Bengkulu, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran




Dr. Shannora Yuliasari, S.TP, M.P
NIP 197407312003122001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (633996) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 3:10 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	26,082,601,660	26,943,031,706	(860,430,046)	(3.19)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,585,242,141)	(9,694,157,711)	108,915,570	(1.12)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	925,000	92,132,771	(91,207,771)	(99)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	925,000	(8,850,000)	9,775,000	(110.45)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	100,982,771	(100,982,771)	(100)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	8,809,630,150	8,741,594,894	68,035,256	0.78
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(774,686,991)	(860,430,046)	85,743,055	(9.97)
EKUITAS AKHIR	25,307,914,669	26,082,601,660	(774,686,991)	(2.97)

Keterangan :

FINAL

Bengkulu, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Shannora Yuliasari, S.TP, M.P

NIP 197407312003122001

ESELON I
: BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 3:10 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	284,960,000	449,288,335	164,328,335	158	153,942,000	211,804,500	(57,862,500)	138
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	284,960,000	449,288,335	164,328,335	158	153,942,000	211,804,500	(57,862,500)	138
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	284,960,000	449,288,335	164,328,335	158	153,942,000	211,804,500	(57,862,500)	138
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	9,826,062,000	9,258,918,485	(567,143,515)	94	9,390,519,000	8,953,399,394	437,119,606	95
1. Belanja Pegawai	5,202,668,000	5,186,603,599	(16,064,401)	100	4,694,761,000	4,629,007,085	65,753,915	99
2. Belanja Barang	4,459,683,000	3,931,868,885	(527,814,115)	88	4,530,258,000	4,166,713,809	363,544,191	92
3. Belanja Modal	163,711,000	140,446,001	(23,264,999)	86	165,500,000	157,678,500	7,821,500	95
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09
SATUAN KERJA : BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU 633996

Tgl Data : 04/05/26 1:43 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 3:10 PM
Halaman : 2
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025					2024		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	9,826,062,000	9,258,918,485	(567,143,515)	94	9,390,519,000	8,953,399,394	437,119,606	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (633996) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 3:09 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	1,505,496	21,600,000	(20,094,504)	(93.03)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(108,000)	108,000	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	1,505,496	21,492,000	(19,986,504)	(93.00)
Persediaan	14,338,000	60,547,000	(46,209,000)	(76.32)
JUMLAH ASET LANCAR	15,843,496	82,039,000	(66,195,504)	(80.69)
ASET TETAP				
Tanah	11,889,507,000	11,889,507,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	9,939,690,843	9,799,244,842	140,446,001	1.43
Gedung dan Bangunan	15,995,922,961	15,995,922,961	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	938,491,000	938,491,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	75,385,616	75,385,616	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(13,521,745,521)	(12,675,190,098)	(846,555,423)	6.68
JUMLAH ASET TETAP	25,317,251,899	26,023,361,321	(706,109,422)	(2.71)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Jangka Panjang lainnya	59,290,945	60,290,945	(1,000,000)	(1.66)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(59,290,945)	(60,290,945)	1,000,000	(1.66)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0	0	
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	1,559,272,512	1,559,272,512	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,555,590,680)	(1,555,224,346)	(366,334)	0.02
JUMLAH ASET LAINNYA	3,681,832	4,048,166	(366,334)	(9.05)
JUMLAH ASET	25,336,777,227	26,109,448,487	(772,671,260)	(2.96)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	28,862,558	26,846,827	2,015,731	7.51
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	28,862,558	26,846,827	2,015,731	7.51
JUMLAH KEWAJIBAN	28,862,558	26,846,827	2,015,731	7.51
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	25,307,914,669	26,082,601,660	(774,686,991)	(2.97)
JUMLAH EKUITAS	25,307,914,669	26,082,601,660	(774,686,991)	(2.97)
JUMLAH EKUITAS	25,307,914,669	26,082,601,660	(774,686,991)	(2.97)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25,336,777,227	26,109,448,487	(772,671,260)	(2.96)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (633996) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 3:09 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Bengkulu, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Shannora Yuliasari, S.TP, M.P

NIP. 197407312003122001

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis**

*Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) merupakan transformasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang resmi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024. BRMP memiliki tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. BRMP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
4. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu merupakan lembaga setingkat eselon III lingkup Kementan yang ditetapkan berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian melaksanakan tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian juga melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- b. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
- c. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
- d. Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
- e. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang kepala. Pelaksanaan tugas Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu dipimpin oleh pejabat struktural Eselon IIIa sebagai Kepala Balai dan dibantu oleh pejabat struktural Eselon IVa yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh yang merupakan entitas pelaporan dari . Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan

pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	43.270.000	284.960.000
Jumlah Pendapatan	43.270.000	284.960.000
Belanja		
Belanja Pegawai	4.828.047.000	5.202.668.000
Belanja Barang	2.814.465.000	4.459.683.000
Belanja Modal	23.270.000	163.711.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	7.665.782.000	9.826.062.000

Realisasi Pendapatan
Rp449.288.335

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp449.288.335 atau mencapai 157,67 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp284.960.000. Pendapatan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp449.288.335. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	284.960.000	449.288.335	157,67
Jumlah	284.960.000	449.288.335	157,67

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 112,12 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	449.288.335	211.804.500	112,12
Jumlah	449.288.335	211.804.500	112,12

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

*Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp449.288.335*

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp449.288.335 dan Rp211.804.500. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 112,12 dari TA 2024 adanya peningkatan pendapatan dari Layanan UPBS dan Layanan Laboratorium. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	449.288.335	211.804.500	112,12
Jumlah	449.288.335	211.804.500	112,12

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	278.615.500	87.967.500	216,73
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	7.157.200	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	15.450.000	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	15.990.939	-	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	106.336.500	56.637.000	87,75
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	185.000	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	34.172.542	51.750.000	(33,97)
Jumlah	449.288.335	211.804.500	112,12

*Realisasi Belanja
Rp9.258.918.485*

B.2 Belanja

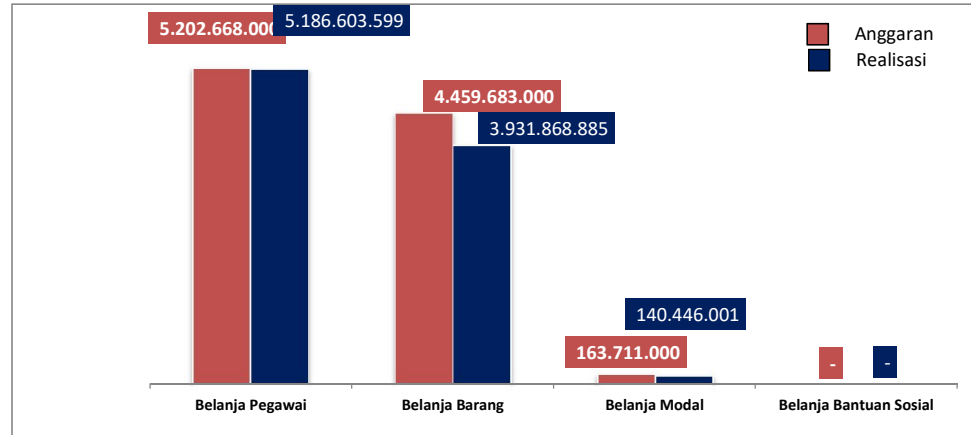
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp9.258.918.485 atau 94,23 % dari anggaran belanja sebesar Rp.9.826.062.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	5.202.668.000	5.186.603.599	99,69
Belanja Barang	4.459.683.000	3.931.868.885	88,16
Belanja Modal	163.711.000	140.446.001	85,79
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	9.826.062.000	9.258.918.485	94,23

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,41% kenaikan pagu anggaran Belanja untuk tahun anggaran 2025. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	5.186.603.599	4.629.007.085	12,05
Belanja Barang	3.931.868.885	4.166.713.809	(5,64)
Belanja Modal	140.446.001	157.678.500	(10,93)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	9.258.918.485	8.953.399.394	3,41

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp5.186.603.599

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.186.603.599 dan Rp4.629.007.085. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 12,05 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi tambah pegawai antar satker, penerimaan PPPK dan penerimaan CPNS.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3.230.974.060	3.030.199.100	6,63
Belanja Pembulatan Gaji PNS	48.536	45.476	6,73
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	216.880.586	211.892.410	2,35
Belanja Tunj. Anak PNS	71.215.858	70.237.870	1,39
Belanja Tunj. Struktural PNS	24.660.000	21.960.000	12,30
Belanja Tunj. Fungsional PNS	287.650.000	249.310.000	15,38
Belanja Tunj. PPh PNS	25.476.046	24.306.226	4,81
Belanja Tunj. Beras PNS	173.301.060	166.566.000	4,04
Belanja Uang Makan PNS	516.823.000	453.263.000	14,02
Belanja Tunjangan Umum PNS	83.485.000	80.295.000	3,97
Beban Gaji Pokok PPPK	228.969.746	89.700.800	155,26
Beban Pembulatan Gaji PPPK	5.196	2.250	130,93
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	5.189.549.501	4.632.463.588	12,03
Pengembalian Belanja Pegawai	2.945.902	3.456.503	(14,77)
Jumlah Belanja	5.186.603.599	4.629.007.085	12,05

*Realisasi Belanja
Barang
Rp3.931.868.885*

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.931.868.885 dan Rp4.166.713.809. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 5,64% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh pengaruh efisiensi terhadap belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	908.313.157	979.647.015	(7,28)
Belanja Barang Non Operasional	1.111.292.065	1.230.360.530	(9,68)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	36.178.000	96.261.984	(62,42)
Belanja Jasa	675.716.183	551.016.161	22,63
Belanja Pemeliharaan	738.139.441	740.089.221	(0,26)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	480.144.049	569.338.898	(15,67)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3.949.782.895	4.166.713.809	(5,21)
Pengembalian Belanja	17.914.010	-	-
Jumlah Belanja	3.931.868.885	4.166.713.809	(5,64)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Realisasi Belanja Modal
Rp140.446.001*

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp140.446.001 dan Rp157.678.500. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 10,93% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh harga beli pada saat pengadaan peralatan dan mesin lebih rendah dari pagu belanja modal peralatan dan mesin yang disediakan.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.446.001	12.000.000	1.070,38
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	145.678.500	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	140.446.001	157.678.500	(10,93)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	140.446.001	157.678.500	(10,93)

*Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0*

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapat pagu anggaran untuk Belanja Modal Tanah.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

*Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp140.446.001*

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp140.446.001 dan Rp12.000.000, mengalami kenaikan sebesar 1.070,38 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh harga beli pada saat pengadaan peralatan dan mesin lebih rendah dari pagu belanja modal peralatan dan mesin yang disediakan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.446.001	12.000.000	1.070,38
Jumlah Belanja Kotor	140.446.001	12.000.000	1.070,38
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	140.446.001	12.000.000	1.070,38

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp145.678.500 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari tidak terdapat pagu anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	145.678.500	(100,00)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	145.678.500	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	145.678.500	(100,00)

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan tidak terdapat pagu anggaran untuk Belanja Modal Jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan tidak terdapat pagu anggaran untuk Belanja Modal Lainnya dan Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial tidak terdapat pagu anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan perpajakan bukan tupoksi satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu. Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp400.942.939

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp400.942.939 dan Rp160.054.500. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 150,50. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan benih padi. Terdapat perbedaan jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak antara Laporan Operasional (Rp. 229.771.939) dengan Laporan Realisasi Anggaran (Rp. 244.616.939). Hal ini disebabkan oleh metode pencatatan LO dan LRA. Penerimaan pembayaran piutang lainnya atas kelebihan bayar Tunjangan Fungsional sebesar Rp. 15.000.000 dan juga cicilan piutang PT. Rekamas sebesar Rp. 1.000.000 pada LO secara akrual sudah dicatatkan sebagai pendapatan pada saat pengakuan piutang, sementara pada LRA dicatat pada saat terjadi pembayaran. Pendapatan sewa rumah dinas potongan gaji pegawai bulan Januari 2025 (Rp. 1.155.000) pada LO sudah dicatat sebagai pendapatan, sementara pada LRA tercatat pada saat SPM terbayarkan per tanggal 1 Juli 2025. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian,	278.615.500	87.967.500,00	216,73
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	15.450.000,00	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	15.990.939	-	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	106.336.500	56.637.000,00	87,75
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	-	-
Jumlah	400.942.939,00	160.054.500,00	150,50

Beban Pegawai
Rp5.185.098.103

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.185.098.103 dan Rp4.625.864.377.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 12,09 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya mutasi tambah pegawai pindah dan juga tambahan penerimaan PPPK dan CPNS. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.230.974.060	3.027.433.500	6,72
Beban Pembulatan Gaji PNS	48.144	43.831	9,84
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	216.880.586	211.670.350	2,46
Beban Tunj. Anak PNS	71.215.858	70.156.214	1,51
Beban Tunj. Struktural PNS	24.660.000	20.340.000	21,24
Beban Tunj. Fungsional PNS	287.055.104	249.310.000	15,14
Beban Tunj. PPh PNS	25.476.046	24.288.126	4,89
Jumlah	5.185.098.103	4.625.864.377	12,09

Beban Persediaan
Rp34.417.000

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34.417.000 dan Rp100.474.984

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 65,75 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	34.417.000	100.474.984	(65,75)
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	34.417.000,00	100.474.984	(65,75)

Beban Barang dan Jasa
Rp2.681.423.126

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.681.423.126 dan Rp2.763.274.353.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2,96 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Keperluan Perkantoran	750.338.537	824.869.114	(9,04)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8.048.195	9.988.000	(19,42)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.936.357	3.849.300	(23,72)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	76.389.000	82.095.000	(6,95)
Belanja Barang Operasional Lainnya	68.651.658	58.845.601	16,66
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Bahan	481.431.770	704.635.930	(31,68)
Belanja Honor Output Kegiatan	-	21.600.000	(100,00)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	615.895.695	504.124.600	22,17
Jumlah	2.681.423.126	2.763.274.353,00	(2,96)

Beban Pemeliharaan
Rp736.139.441

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp736.139.441 dan Rp740.089.221.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,53 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	318.558.659	267.669.200	19,01
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.850.000	54.785.000	(72,89)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	367.125.282	383.875.021	(4,36)
Belanja Pemeliharaan Lainnya	35.605.500	33.760.000	5,47
Jumlah	736.139.441	740.089.221	(0,53)

Beban Perjalanan Dinas
Rp480.144.049

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp480.144.049 dan Rp569.338.898

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 15,67 persen disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Perjalanan Biasa	426.939.049	491.523.898	(13,14)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.205.000	77.815.000	(31,63)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah	480.144.049,00	569.338.898	(15,67)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp280.899.500

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp280.899.500 dan Rp106.975.000

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 162,58 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh benih padi yang sebelumnya dicatat sebagai Persediaan Bahan Baku, tahun 2025 dicatatkan sebagai Persediaan Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat. Beban Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat tahun ini adalah benih padi yang diserahkan kepada masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perbenihan. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	280.899.500	106.975.000,00	162,58
Jumlah	280.899.500,00	106.975.000	162,58

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp846.921.757

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp846.921.757 dan Rp1.021.402.378.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	437.247.965	532.553.730	(17,90)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	391.654.203	389.602.394	0,53
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	81.234.667	(100,00)
Beban Penyusutan Irigasi	17.653.255	17.681.755	(0,16)
Beban Penyusutan Jaringan	-	66.667	(100,00)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digu	366.334	263.165	39,20
Jumah Penyusutan	846.921.757	1.021.402.378	(17,08)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	846.921.757	1.021.402.378	(17,08)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih Rp-
1.108.000*

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-1.108.000 dan Rp108.000

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	(108.000)	108.000	(200)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(1.000.000)	-	-
Jumlah	(1.108.000,00)	108.000	(1.126)

*Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp7.157.200*

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.157.200 dan Rp-21.882.500

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pelepasan Aset	-	(21.882.500,00)	(100)
Jumlah	7.157.200,00	(21.882.500)	(133)

*Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0*

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp250.592.696*

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp250.592.696 dan Rp95.197.500.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	185.000	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	12.572.542	73.350.000,00	(82,86)
Jumlah	250.592.696,00	95.197.500	163,23

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

tidak terdapat belanja TA 2025 untuk penanganan Covid - 19

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

Terdapat perbedaan data yang disajikan antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Perbedaan tersebut disajikan sebagai berikut:

TELAH LAPORAN KEUANGAN LAYER 1 TINGKAT SATKER						
NO	Jenis Telaah	Periode	LO	LRA	Selisih	
1	LRA VS LO PENDAPATAN	12	-Rp 658.692.835	-Rp 449.288.335	-Rp 209.404.500	
2	LRA VS LO BELANJA PEGAWAI	12	Rp 5.186.603.599	Rp 5.186.603.599	Rp -	
3	LRA VS LO BELANJA BARANG DAN JASA	12	Rp 2.681.423.126	Rp 2.679.407.395	Rp 2.015.731	
4	LRA VS LO BELANJA PERJALANAN DINAS	12	Rp 480.144.049	Rp 480.144.049	Rp -	

Adapun perbedaan antara pendapatan pada Laporan Operasional dan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan berdasarkan LRA	Rp 449.288.335
Dikurangi Pendapatan Kas Basis	
Pembayaran piutang - kelebihan tunjangan fungsional	-Rp 21.600.000
Pembayaran piutang - TGR PT. Rekamas	-Rp 1.000.000
Ditambah Pendapatan Akrua Basis	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	Rp 232.004.500
Selisih	Rp 209.404.500
Pendapatan berdasarkan LO	Rp 658.692.835

Jumlah Pendapatan Negara PNBP Bukan Pajak dari kegiatan operasional, pada LO senilai Rp400.942.939,00 sedangkan pada LRA senilai Rp449.288.335,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp48.345.396,00. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pencatatan antara LO dan LRA. Perbedaan pencatatan tersebut dijelaskan sebagai berikut: (1) pembayaran piutang senilai Rp22.600.000 yang pada LO tidak lagi dicatat sebagai pendapatan terdiri dari pembayaran piutang kelebihan tunjangan fungsional Rp21.600.000 dan angsuran piutang PT. Rekamas Rp.1.000.000 (2) pendapatan yang pada LO dicatat secara terpisah sebagai pendapatan kegiatan non operasional senilai Rp25.745.396 terdiri dari Penjualan Peralatan dan Mesin Rp7.157.200, Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Rp185.000 Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp12.572.542 Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp5.830.654

Adapun perbedaan antara Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Operasional dan Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa berdasarkan LRA	Rp	2.679.407.395
Dikurangi Belanja Barang dan Jasa Kas Basis		
Tagihan Listrik 2024 yang dibayarkan di Januari 2025	-Rp	23.856.450
Tagihan Telepon 2024 yang dibayarkan di Januari 2025	-Rp	100.377
Tagihan Air 2024 yang dibayarkan di Januari 2025	-Rp	2.890.000
Ditambah Belanja Barang dan Jasa Akrua Basis		
Tagihan Listrik 2025 yang dibayarkan akan di Januari 2026	Rp	26.812.880
Tagihan Telepon 2025 yang dibayarkan akan di Januari 2026	Rp	99.678
Tagihan Air 2025 yang dibayarkan akan di Januari 2026	Rp	1.950.000
Selisih	Rp	2.015.731
Belanja Barang dan Jasa berdasarkan LO	Rp	2.681.423.126

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.26.082.601.660,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.26.082.601.660,00 dan Rp.26.943.031.706,00

Defisit LO
Rp.9.585.242.141,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.9.585.242.141,00 dan Rp.9.694.157.711,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.925.000 dan Rp.92.132.771 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan*
Rp.925.000,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.925.000,00 dan Rp.-8.850.000,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	925.000
	-
Jumlah	925.000,0

*Koreksi Atas
Reklasifikasi* Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.100.982.771. .

Koreksi ini merupakan koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 129.024.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 49.923.729 ditambah koreksi pencatatan penambahan nilai Gedung dan Bangunan atas transaksi pengembangan KDP dengan nilai di bawah nilai kapitalisasi.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.8.809.630.150 dan Rp.8.741.594.894. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.258.918.485
Diterima dari Entitas Lain	(449.288.335)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	8.809.630.150

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 9.258.918.485, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 449.288.335

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir
Rp25.307.914.669

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.25.307.914.669,00 dan Rp.26.082.601.660,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp1.505.496

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.505.496 dan Rp21.600.000. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	1.505.496	21.600.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Jumlah	1.505.496	21.600.000

Piutang Lainnya merupakan piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional pegawai - pegawai yang mengalami perpindahan jabatan sebagai penyesuaian atas perubahan nomenklatur satker dari BPTP Bengkulu menjadi BPSIP Bengkulu pada tahun 2023. Saldo pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp. 21.600.000. Selama tahun 2025 telah diterima pembayaran atas piutang lainnya tersebut dan dinyatakan lunas . Adapun rincian piutang lainnya atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional adalah sebagai berikut:

MONITORING KELEBIHAN TUNJANGAN FUNGSIONAL (PERUBAHAN FUNGSIONAL PENELITI MENJADI FUNGSIONAL EKS PENELITI YANG TETAP DI KEMENTAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU						
NO	NAMA DEBITUR	PER 31 DES 2024	MUTASI		PER 31 Desember 2025	KETERANGAN
			TAMBAH	KURANG		
1	Monita Puspitasari, SP, MP	1.680.000		1.680.000	-	Lunas
2	Wahyuni Amelia Wulandari, S.Pt. M.Si	2.850.000		2.850.000	-	Lunas
3	Hamdan, SP, M.Si	-		-	-	Lunas
4	Nurmegawati, SP, MP	2.850.000		2.850.000	-	Lunas
5	Irma Calista Siagian, ST.,M.Sc.Agr	2.850.000		2.850.000	-	Lunas
6	Yesmawati, SP	1.800.000		1.800.000	-	Lunas
7	Yulie Oktavia, SP	1.800.000		1.800.000	-	Lunas
8	Herlena Bidi Astuti, SP, MP	1.800.000		1.800.000	-	Lunas
9	Kusmea Dinata, SP,MP	1.800.000		1.800.000	-	Lunas
10	Ria Puspitasari, S.Pt. M.Si	1.800.000		1.800.000	-	Lunas
11	Wilda Mikasari, S.TP, M.Si	2.370.000		2.370.000	-	Lunas
TOTAL		21.600.000		21.600.000	-	

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp108.000. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	1.505.496	%	-
Kurang Lancar	-	%	-
Diragukan	-	%	-
Macet	-	%	-
Jumlah	1.505.496		-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	%	-
Kurang Lancar	-	%	-
Diragukan	-	%	-
Macet	-	%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
an Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
an Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	%	-
Kurang Lancar	-	%	-
Diragukan	-	%	-
Macet	-	%	-
Jumlah	-		-

Persediaan
Rp14.338.000

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp14.338.000 dan Rp60.547.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	4.883.000	3.122.000
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	9.455.000	57.425.000
Bahan Baku	-	-
Jumlah	14.338.000	60.547.000

Persediaan tersebut di atas dalam kondisi baik.

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
	Jumlah	-	-

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp59.290.945 dan Rp60.290.945. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	59.290.945	60.290.945
	-	-
Jumlah	59.290.945	60.290.945

Piutang Jangka Panjang lainnya ini merupakan kelebihan pembayaran kegiatan renovasi gedung BPTP Balitbangtan Bengkulu TA 2016 sesuai dengan kontrak No.951/PL.220/H.12.4/05/2016 tanggal 12 Mei 2016 dan addendum kontrak No. B-2178/PL.220/H.12.4/11/2016 tanggal 10 November 2016 pada PT. Rekamas Radinasa Bhakti berdasarkan hasil audit Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan LHP R.327/PW.130/G.4/11/2017 tanggal 28 Nopember 2017 sebesar Rp. 65.290.945.

PT. Rekamas Radinasa Bhakti melakukan pembayaran angsuran I sebesar Rp. 5.000.000 pada tanggal 25 Januari 2018 dan selanjutnya tidak lagi melakukan pembayaran sehingga penyelesaian penagihan piutang ini telah diserahkan ke PUPN sesuai dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor: SP3N 01/PUPNC.09/2019 tanggal 19 Februari 2019.

Sejak tanggal 19 Februari 2019, PT. Rekamas Radinasa Bhakti melakukan pembayaran sekali per tanggal 04 Februari 2025 sebesar Rp. 1.000.000. Berikut adalah monitoring tindak lanjut penyelesaian penagihan piutang yang dilaksanakan PUPN:

PROVINSI/SATUAN KERJA/NOMOR DAN TANGGAL LHP	URAIAN TEMUAN	TEMUAN AWAL	Angsuran s/d 31 Des 2024	SALDO s/d 31 DES 2024	Angsuran 2025	SALDO AKHIR	KET.	UPAYA-UPAYA YG TELAH DILAKUKAN	HAMBATAN-HAMBATAN
BPSIP BENGKULU	Total	65.290.945	5.000.000	60.290.945	1.000.000	59.290.945			
LHP R.327/PW.130/G.4/11/20 17. 28 Nov 2017 SKTM Bastian SE	Kelebihan Pembayaran (PT Rekamas Radinasa Bhakti)	65.290.945	5.000.000	60.290.945	1.000.000	59.290.945		- Penyerahan Piutang Negara ke PUPN dengan surat B-2202/PL.220/H.12.4/11/2016 tanggal 30 November 2028 - Panggilan Pertama dengan surat SPG-01/WKN.05/KNL.01/2019 tanggal 25 Februari 2019 - Panggilan Kedua dengan surat SPG-03/WKN.05/KNL.01/2019 tanggal 14 Maret 2019 - Panggilan Terakhir dengan surat SPG-04/WKN.05/KNL.01/2019 tanggal 09 April 2019 - Penetapan Jumlah Piutang Negara dengan surat PUPN-01/PUPNC.09/2019 tanggal 26 April 2019 - Surat Paksa dengan surat SP-11/PUPNC.09/2019 tanggal 19 November 2019 - Pemberitahuan penyelesaian hutang dengan Mekanisme Crash Program dengan surat S-161/WKN.05/KNL.01/2021 tanggal 26 Februari 2021 - Pemberitahuan penyelesaian hutang dengan Mekanisme Crash Program dengan surat S-659/WKN.05/KNL.01/2021 tanggal 03 September 2021 - Pemberitahuan penyelesaian hutang dengan Mekanisme Crash Program dengan surat S-105/KNL.0501/2022 tanggal 28 Maret 2022 - Rekonsiliasi piutang BPSIP Bengkulu dan KPKNL dengan Berita Acara nomor: BAR-02/KNL.0501/2024 tanggal 24 April 2024 - Pemberitahuan penyelesaian hutang dengan Mekanisme Crash Program dengan surat S-636/KNL.0501/2022 tanggal 06 Juni 2024	- Hambatan sampai dengan akhir tahun 2024: - Tidak ada respon dari debitur (PT Rekamas Radinasa Bhakti) - Debitur tidak dapat dijumpai secara langsung - Instansi berwenang (Lurah setempat) untuk menerbitkan surat keterangan tidak mampu guna penyelesaian piutang secara administratif, tidak dapat dilakukan dikarenakan menurut Lurah setempat beranggapan penanggung hutang masih dikategorikan mampu - Pelaksanaan Seksi Piutang Negara KPKNL Bengkulu yang sering berganti, sehingga penanganan dan tindak lanjut penyelesaian piutang berulang.

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp59.290.945 dan Rp60.290.945. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	(59.290.945)	100%	(59.290.945)
Jumlah	(59.290.945)		(59.290.945)
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(59.290.945)		(59.290.945)

Properti Investasi Rp0

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
Jumlah	-	-

*Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi Rp0*

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

*Tanah
Rp11.889.507.000*

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.889.507.000 dan Rp11.889.507.000. Nilai Tanah tersebut merupakan nilai setelah revaluasi tahun 2019. Tanah seluas 22.874 m2 terdiri atas 1 (satu) dokumen kepemilikan berupa sertifikat atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Pertanian dengan nomor sertifikat 07.04.02.22.4.00016. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	11.889.507.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	11.889.507.000

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	22.874 m2	Jl. Irian KM. 6,5 Kota Bengkulu	Rp. 11.889.507.000
2	-	-	-
Jumlah			-

*Tanah Belum Diregister
Rp0*

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp9.939.690.843

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp9.939.690.843 dan Rp9.799.244.842. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	9.799.244.842
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	9.939.690.822
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(9.450.842.191)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	488.848.631

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp15.995.922.961

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp15.995.922.961 dan Rp15.995.922.961. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	15.995.922.961
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	-
Pembelian	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	15.995.922.961
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(3.272.907.669)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	12.723.015.292

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada.

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp938.491.000

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.938.491.000 dan Rp.938.491.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	938.491.000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	938.491.000
Akumulasi Penyusutan s.d.	(797.995.661)
Nilai Buku per	140.495.339

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp75.385.616

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.75.385.616 dan Rp.75.385.616. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	75.385.616
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	75.385.616
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	75.385.616

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

- Tidak ada.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp13.521.745.521

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp13.521.745.521 dan Rp12.675.190.098. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	9.939.690.843	(9.450.842.191)	488.848.652
2	Gedung dan Bangunan	15.995.922.961	(3.272.907.669)	12.723.015.292
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	938.491.000	(797.995.661)	140.495.339
4	Aset Tetap Lainnya	75.385.616	-	75.385.616
Akumulasi Penyusutan		26.949.490.420	(13.521.745.521)	13.427.744.899

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
-	-	-
	Jumlah	-

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(6.115.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	(6.115.000)

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	-

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya Rp0

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana Lainnya	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

Dana Cadangan
Perwakilan RI di Luar
Negeri Rp0

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

Aset Lain-lain
Rp1.559.272.512

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.559.272.512 dan Rp1.559.272.512. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	1.559.272.512
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.559.272.512
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(1.549.475.680)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	9.796.832

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 1.555.590.680

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp1.555.590.680 dan Rp1.555.224.346. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	(6.115.000)	(6.115.000)
Aset Lain-lain	1.559.272.512	(1.549.475.680)	9.796.832
-	-	-	-
Total	1.559.272.512	(1.555.590.680)	3.681.832

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp28.862.558

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp28.862.558 dan Rp26.846.827. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	28.862.558	26.846.827
Total	28.862.558	26.846.827

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Tagihan Listrik 2025 yang dibayarkan akan di Januari 2026	Rp	26.812.880
Tagihan Telepon 2025 yang dibayarkan akan di Januari 2026	Rp	99.678
Tagihan Air 2025 yang dibayarkan akan di Januari 2026	Rp	1.950.000
Total Utang kepada Pihak Ketiga :	Rp	28.862.558

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

-

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

-

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

-

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

-

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

-

Ekuitas
Rp25.307.914.669

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25.307.914.669. dan Rp26.082.601.660. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN